

I. PENDAHULUAN

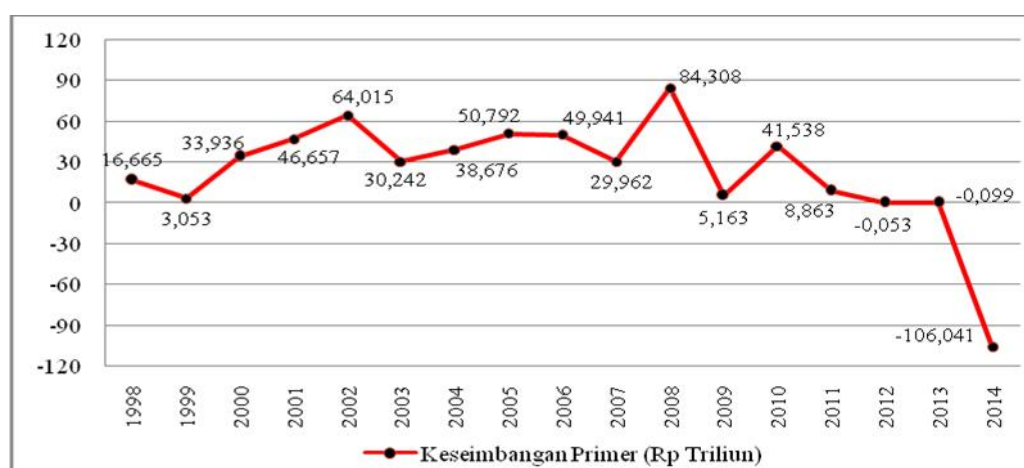
A. Latar Belakang

Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan ekonomi untuk mengendalikan keseimbangan makroekonomi dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik dengan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah (Kementerian Keuangan RI, 2010). Kebijakan fiskal merupakan proses penetapan pajak dan pengeluaran pemerintah dalam rangka membantu memperkecil fluktuasi dari siklus usaha (*business cycle*) dan membantu untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja yang tinggi, dan membebaskan dari inflasi yang tinggi atau bergejolak (Samuelson, 1995).

Dalam pengelolaan stabilitas makroekonomi, kebijakan fiskal akan berinteraksi dengan kebijakan moneter. Sarana yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Melalui APBN ini, pemerintah harus menjalankan peran dan fungsi sentral kebijakan fiskal dengan baik agar keadaan APBN berkesinambungan, menjadi sehat dan tidak menimbulkan masalah. Demi mendukung penurunan tingkat defisit, pemerintah selalu berusaha menjaga defisit kumulatif APBN dan APBD dalam batas yang dapat diatur yaitu di bawah 3% sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Untuk membiayai defisit APBN, pemerintah secara bertahap merubah kebijakan pembiayaan dengan mempertimbangkan sumber-sumber pembiayaan yang berisiko rendah, kemampuan membayar pinjaman, dan kemampuan menyerapnya. Salah satu pendekatan untuk menilai kesinambungan fiskal adalah pendekatan keadaan nilai sekaang (*present value constraint approach*) yang menyatakan bahwa kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*) tercapai apabila jumlah utang pemerintah pada tahun anggaran tertentu sama dengan nilai sekarang (*present value*) dari surplus keseimbangan primer (*primary balance*) di masa mendatang. Begitu juga dengan pendekatan akuntansi yang mengandalkan besaran keseimbangan primer sebagai tolok ukur (Kementerian Keuangan RI, 2010).

Keseimbangan primer merupakan total penerimaan dikurangi belanja dalam APBN yang tidak termasuk pembayaran bunga. Jika berada dalam kondisi defisit, penerimaan negara tidak bisa menutup pengeluaran sehingga membayar bunga utang sudah menggunakan pokok utang baru. Gambar 1. menunjukkan pergerakan keseimbangan primer APBN Indonesia dari tahun 1998 sampai 2014.



Gambar 1. Perkembangan Keseimbangan Primer 1998 – 2014

Sumber : Kementerian Keuangan (2014) diolah

Terlihat bahwa dalam tiga tahun terakhir, Indonesia mengalami defisit pada keseimbangan primernya. Selama pemerintah beralih dalam menggunakan struktur APBN *T-account* menjadi *I-account*, operasi keuangan pemerintah untuk pertama kalinya terjadi defisit keseimbangan primer pada APBN 2012 sejak tahun 1998 hingga 2011 keadaan keseimbangan primer selalu mengalami fluktuasi surplus. Dan pada tahun 2012 hingga 2014 pergerakan keseimbangan primer masih mengalami defisit sebesar 106,041 triliun rupiah pada tahun 2014 terakhir.

Bank Indonesia dalam laporan perekonomian Indonesia (2012) menjelaskan bahwa keseimbangan primer terjadi akibat kombinasi dari beberapa faktor. Hal ini terjadi karena di faktor utama yaitu pendapatan negara pada tahun 2012 terekam lebih rendah dibandingkan dengan target APBN-P karena tidak optimalnya penyerapan pajak akibat perlambatan ekonomi global yang berdampak pada lebih rendahnya pertumbuhan ekonomi nasional dibandingkan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi pada APBN-P 2012. Sedangkan faktor utama lain, pengeluaran pemerintah untuk subsidi BBM yang terus mengalami peningkatan menyebabkan realisasi subsidi jauh melampaui batas anggaran subsidi dalam APBN-P 2012.

Defisit keseimbangan primer APBN berisiko mengganggu kesinambungan fiskal karena beban bunga utang harus ditutup dengan penarikan pokok utang baru. Akibatnya, rasio utang terhadap produk domestik bruto berisiko meningkat. Dengan menggunakan salah satu pendekatan untuk menilai kesinambungan fiskal, melihat kondisi keseimbangan primer APBN yang bernilai negatif, kesinambungan fiskal Indonesia terganggu. Hal ini perlu dilakukan langkah-

langkah strategis untuk menjaga kesinambungan fiskal. Dibawah ini merupakan tabel realisasi APBN yang menunjukkan posisi dari keseimbangan primer dalam APBN dalam empat tahun terakhir sejak 2011 sampai 2014.

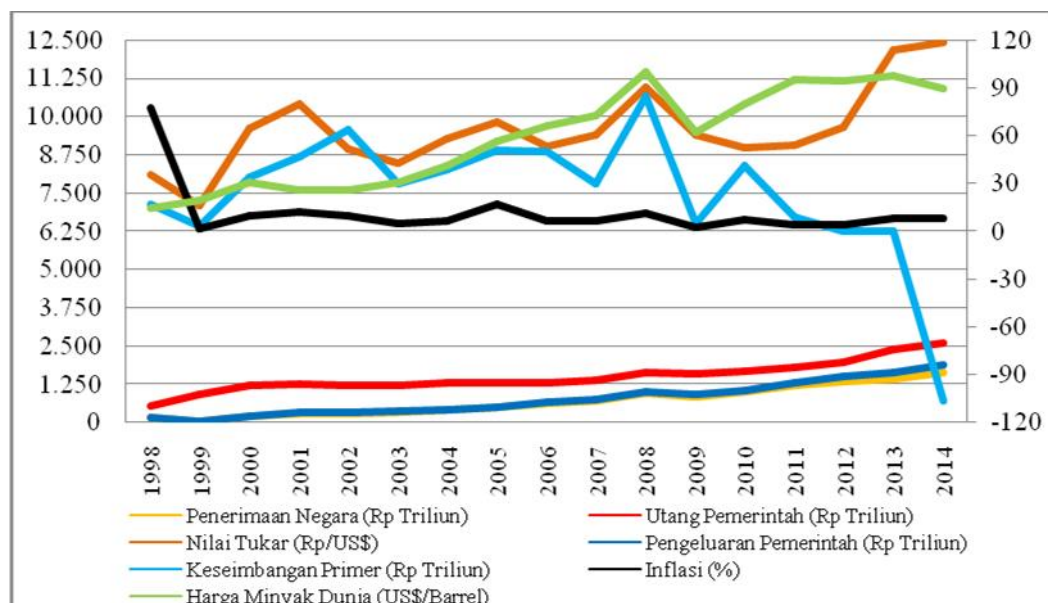
Tabel 1. Ringkasan Realisasi APBN 2011-2014 (Triliun Rupiah)

Keterangan	2011	2012	2013	2014
	LKPP	LKPP	LKPP	APBN-P
Pendapatan Negara dan Hibah	1.210,6	1.338,1	1.438,9	1.635,4
I. Penerimaan Dalam Negeri	1.205,4	1.332,3	1.432,1	1.633,1
1. Penerimaan Perpajakan	873,9	980,5	1.077,3	1.246,1
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	332,5	351,8	354,8	386,9
II. Hibah	5,2	5,8	6,8	3,3
Belanja Negara	1.295,0	1.491,4	1.650,6	1.876,9
I. Belanja Pemerintah Pusat	883,7	1.010,6	1.137,2	403,0
II. Transfer Ke Daerah	411,3	480,6	513,3	596,5
III.Suspen	0	0,2	0,1	-
Keseimbangan Primer	8,8	(52,8)	(98,6)	(106,0)
Surplus/ Defisit Anggaran (A-B) E	(84,4)	(153,3)	(211,7)	(241,5)
Pembiayaan (E.I + E.II)	130,9	175,2	237,4	241,5
I. Pembiayaan Dalam Negeri	102,7	137,0	219,3	253,7
II. Pembiayaan Luar Negeri (netto)	28,3	38,1	18,1	(12,2)

Sumber : Kementerian Keuangan

Kondisi keseimbangan primer di Indonesia menunjukkan bahwa keseimbangan primer mengalami defisit sejak tahun 2012 hingga APBN-P 2014 pun masih menunjukkan defisit. Sedangkan keseimbangan primer merupakan indikator yang menunjukkan kapasitas fiskal untuk membiayai belanja negara. Ketika posisi keseimbangan primer defisit dan rasio keseimbangan primer terhadap PDB itu pun negatif maka dapat dipastikan bahwa pengeluaran pemerintah akan banyak

bergantung kepada utang sehingga utang negara akan mengalami kenaikan signifikan. Ketika kondisi ini terus berlanjut maka kecenderungan yang terjadi adalah semakin meningkatnya defisit dimasa yang akan datang dengan bertambahnya pembayaran utang ataupun pengeluaran belanja pemerintah yang lain. Khususnya pengeluaran pemerintah pada subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) yang memicu kenaikan impor BBM. Sedangkan harga minyak dunia terus mengalami peningkatan. Terjadinya kelebihan pembiayaan pemerintah yang cukup besar sejak tahun 2008 dan penerimaan dari sumber pajak yang terus menurun memperparah kondisi defisit APBN ataupun rasio keseimbangan primer. Sementara realisasi penyerapan anggaran sebagaimana yang ditargetkan dalam APBN-P tidak mampu dipenuhi (Kementerian Keuangan RI, 2013).



Gambar 2. Pergerakan keseimbangan primer, penerimaan negara, pengeluaran pemerintah, utang pemerintah, inflasi, nilai tukar, dan harga minyak dunia 1998-2014

Sumber : Kementerian Keuangan

Gambar 2 menunjukkan perkembangan keseimbangan primer, penerimaan negara, pengeluaran pemerintah, utang pemerintah, inflasi, nilai tukar, dan harga minyak dunia. Terlihat bahwa kondisi perekonomian global mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan dari krisis utang dan fiskal di Eropa. Kecenderungan naiknya harga minyak dunia yang sangat tinggi berdampak pada kondisi keseimbangan primer, hal ini mengakibatkan beban subsidi BBM dan listrik menjadi meningkat. Adanya kecenderungan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat mengakibatkan kondisi keseimbangan primer semakin menurun. Secara keseluruhan, pergerakan tersebut menunjukkan pemerintah harus lebih berhati-hati dalam pengelolaan keuangan negara (Bank Indonesia dalam Laporan Perekonomian Indonesia, 2012).

Dalam gambar menunjukkan pengeluaran pemerintah melebihi dari penerimaan yang diterima pada tahun 2014 penerimaan negara sebesar 1.635,379 triliun rupiah sedangkan pengeluaran pemerintah sebesar 1.876,871 triliun rupiah. Hal ini dibuat pemerintah agar APBN mengalami defisit dengan tujuan agar mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi kenyataannya keadaan tersebut mempengaruhi keseimbangan primer, yang mengalami defisit pada tahun 2014 begitu besar hingga mencapai defisit 106,041 triliun pada tahun 2014.

Keadaan defisit ini disebabkan pula dengan melemahnya nilai tukar rupiah yang sepanjang tahun mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir mengalami depresiasi yang cukup tinggi menunjukkan angka 12.440 pada tahun 2014.

Asumsi nilai tukar rupiah yang berhubungan dengan transaksi dalam APBN berkaitan dengan mata uang asing seperti penerimaan pinjaman, dan pembayaran

utang luar negeri, penerimaan minyak dan pemberian subsidi BBM. Sehingga nilai tukar menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah, serta besarnya pembiayaan anggaran.

Harga minyak dunia yang semakin meningkat menyebabkan pemerintah harus mengeluarkan anggaran lebih untuk subsidi BBM, pengeluaran yang melebihi anggaran tanpa diiringi penerimaan yang meningkat mengakibatkan pemerintah harus mencari dana untuk menutupi kekurangan anggaran, hal ini mengakibatkan utang pemerintah selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang begitu besar menunjukkan angka 2.604,88 triliun pada tahun 2014 sedangkan pada tahun 2010 utang pemerintah masih menunjukkan angka dibawah dua ribu triliun atau lebih tepatnya sebesar 1.681,66 meningkat sebesar hampir 75% selama lima tahun terakhir.

Kenaikan tajam pada anggaran yang defisit dapat menyebabkan masalah yang parah terhadap ekonomi makro dan dapat menghambat kontrol defisit fiskal itu sendiri. Hal ini terjadi terutama pada negara-negara berkembang, di mana kebutuhan untuk belanja anggaran adalah tinggi dan dimana sistem pajak, dan regulasi publik dan akuntabilitas lemah. Melalui APBN ini, pemerintah harus menjalankan peran dan fungsi sentral kebijakan fiskal dengan baik agar keadaan APBN berkesinambungan, menjadi sehat dan tidak menimbulkan masalah.

Keadaan seperti itu juga dihadapi oleh Indonesia. Indonesia telah terbelit utang yang berat untuk menutup defisit APBN akibat adanya krisis ekonomi. Utang pemerintah telah bertambah menjadi tiga sampai empat kali lipat dari kondisi sebelum krisis, dan hampir tiga perempat dari pertambahan ini merupakan utang

dalam negeri yang harus dibayar untuk restrukturisasi perbankan (Boediono, 2009). Hal ini akan sangat membatasi ruang gerak fiskal (*fiscal space*) pada masa pemerintahan sekarang ini, sehingga telah menggeser permasalahan dari stimulus fiskal menjadi sustainabilitas fiskal (Rahmany, 2004). Secara konseptual, APBN dikatakan berkesinambungan apabila ia memiliki kemampuan untuk membiayai seluruh belanjanya selama jangka waktu yang tidak terbatas (Langenus, 2006; Yeyati dan Sturzenegger, 2007). Akibat banyaknya utang pemerintah mengalami defisit APBN dan neraca pembayaran yang terus meningkat. Utang luar negeri diandalkan untuk mengatasi permasalahan defisit anggaran dan neraca pembayaran.

Kemampuan membayar angsuran utang dan bunganya ditentukan oleh penerimaan pemerintah dari sumber dalam negeri, inflasi dan nilai tukar rupiah selain dari penghasilan devisa. Peningkatan pengeluaran untuk membayar angsuran utang dan bunga utang, diikuti dengan adanya penurunan penerimaan pemerintah karena turunnya penerimaan dari sumber lain menyebabkan defisit anggaran dan utang luar negeri pemerintah meningkat. Defisit anggaran yang didanai oleh utang luar negeri pemerintah menyebabkan terus meningkatnya jumlah utang luar negeri. Adanya utang luar negeri membawa dampak pada kewajiban untuk membayar bunga dan cicilan utang karena berpengaruh terhadap neraca pembayaran dan APBN suatu negara. Seberapa besar utang dapat ditoleransi oleh sebuah perekonomian sangat tergantung, likuiditas dan solvabilitas perekonomian suatu negara yang terlibat dalam utang tersebut (Agenor, 1996).

Begitu banyak penyebab yang menimbulkan keseimbangan primer mengalami defisit, maka penelitian mengenai keseimbangan primer sangat menarik untuk diteliti. Penelitian mengenai defisit APBN telah banyak dilakukan antara lain Harun Rosit (2010) yang meneliti tentang hubungan kausalitas asumsi APBN terhadap APBN di Indonesia menghasilkan kesimpulan bahwa asumsi APBN memberi kontribusi terhadap APBN, tetapi perkiraan varian yang paling memberi kontribusi APBN adalah harga minyak internasional dan nilai tukar. Studi empiris lain dilakukan oleh Djamester A. Simamarta (2007) mengenai *Fiscal Sustainability In Indonesia* yang menghasilkan kesimpulan bahwa tingkat kesinambungan fiskal di Indonesia masih dalam tahap aman meskipun kompleksitas hutang luar negeri dapat mempengaruhi keberlanjutan hutang. Studi empiris mengenai analisis dalam mengatasi dampak krisis global melalui program stimulus fiskal APBN 2009 yang dilakukan oleh Departemen Keuangan menghasilkan penelitian yang menyimpulkan bahwa dengan adanya perubahan beberapa asumsi ekonomi makro (pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, tingkat suku bunga, harga dan *lifting* minyak mentah Indonesia) yang secara signifikan berpengaruh terhadap besaran-besaran APBN, baik pada pendapatan negara maupun belanja negara.

Oleh karena itu dalam penelitian ini ingin menganalisis tentang “Analisis Determinan Keseimbangan Primer Sebagai Indikator Kesinambungan Fiskal Indonesia Periode 1998-2014”. Dimana dalam penelitian ini menggunakan data tahunan, dan metode yang dipakai adalah metode ECM (*Error Correction Model*) untuk mengetahui pengaruh jangka pendek. Dan menggunakan regresi berganda OLS (*Ordinary Least Square*) untuk mengetahui pengaruh jangka panjang.

Mengingat pengaruh yang mengakibatkan keseimbangan primer mengalami defisit tidak hanya dalam jangka panjang tetapi juga dalam jangka pendek.

B. Rumusan Masalah

Defisit keseimbangan primer APBN berisiko mengganggu kesinambungan fiskal karena beban bunga utang harus ditutup dengan penarikan pokok utang baru.

Akibatnya, rasio utang terhadap produk domestik bruto berisiko meningkat.

Dengan menggunakan salah satu pendekatan untuk menilai kesinambungan fiskal, melihat kondisi keseimbangan primer APBN yang bernilai negatif,

kesinambungan fiskal Indonesia akan terganggu. Harusnya meskipun tidak mencapai surplus, menekan defisit APBN akan membuat keseimbangan primer APBN menjadi lebih baik. Jika dilihat secara keseluruhan Indonesia belum bisa mencapai kesinambungan fiskal secara optimal karena semakin tingginya belanja negara dan ketidak mampuan pihak pemerintah dalam membayar cicilan pokok utang, sehingga menyebabkan kesenjangan anggaran yang terus berlanjut.

Permasalahan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu penting bagi pemerintah untuk mengetahui bagaimana pergerakan fluktuasi keseimbangan primer hingga menyebabkan angka dalam APBN mencapai kondisi defisit. Dengan mengetahui variabel yang berkaitan secara signifikan mempengaruhi keseimbangan primer serta bagaimana pengaruh yang diberikan. Beberapa variabel menunjukkan bahwa ada beberapa data yang menunjukkan ketidak sesuaiandengan teori dan beberapa penelitian terdahulu terhadap defisit APBN. Dengan demikian, maka yang menjadi perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah variabel penerimaan negara berpengaruh signifikan dan positif terhadap keseimbangan primer dalam jangka pendek dan jangka panjang ?
2. Apakah variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap keseimbangan primer dalam jangka pendek dan jangka panjang ?
3. Apakah variabel utang pemerintah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap keseimbangan primer dalam jangka pendek dan jangka panjang ?
4. Apakah variabel inflasi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap keseimbangan primer dalam jangka pendek dan jangka panjang ?
5. Apakah variabel nilai tukar berpengaruh signifikan dan positif terhadap keseimbangan primer dalam jangka pendek dan jangka panjang ?
6. Apakah variabel harga minyak dunia berpengaruh signifikan dan negatif terhadap keseimbangan primer dalam jangka pendek dan jangka panjang ?
7. Apakah variabel penerimaan negara, pengeluaran pemerintah, utang pemerintah, inflasi, nilai tukar dan harga minyak dunia berpengaruh secara bersama-sama terhadap keseimbangan primer dalam jangka pendek dan jangka panjang ?

C. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel penerimaan negara berpengaruh signifikan dan positif terhadap keseimbangan primer dalam jangka pendek dan jangka panjang.

2. Untuk mengetahui pengaruh variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap keseimbangan primer dalam jangka pendek dan jangka panjang.
3. Untuk mengetahui pengaruh variabel utang pemerintah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap keseimbangan primer dalam jangka pendek dan jangka panjang.
4. Untuk mengetahui pengaruh variabel inflasi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap keseimbangan primer dalam jangka pendek dan jangka panjang.
5. Untuk mengetahui pengaruh variabel nilai tukar berpengaruh signifikan dan positif terhadap keseimbangan primer dalam jangka pendek dan jangka panjang.
6. Untuk mengetahui pengaruh variabel harga minyak dunia berpengaruh signifikan dan negatif terhadap keseimbangan primer dalam jangka pendek dan jangka panjang.
7. Untuk mengetahui pengaruh variabel penerimaan negara, pengeluaran pemerintah, utang pemerintah, inflasi, nilai tukar, dan harga minyak dunia berpengaruh secara bersama-sama terhadap keseimbangan primer dalam jangka pendek dan jangka panjang.

2. Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat berguna terhadap berbagai pihak, seperti :

- a. Diharapkan dapat berguna sebagai tambahan informasi bagi lembaga-lembaga terkait dalam menentukan kebijaksanaanya yang berkaitan dengan kenimabungan anggaran.
- b. Diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana kontribusi faktor pembentukan struktur fiskal dan utang luar negeri terhadap kesinambungan anggaran.
- c. Diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi peneliti lain yang berminat pada masalah yang sama dan analisis yang dapat diperoleh dapat menjadi informasi bagi pihak yang memerlukan.

D. Kerangka Pemikiran

Secara umum definisi mengenai kesinambungan fiskal berkaitan dengan keseimbangan primer (*primary balance*) dan kondisi utang suatu negara.

Beberapa ahli mendefinisikan kesinambungan fiskal dengan melihat hubungan pertumbuhan ekonomi dan stok utang. Menurut Edwards (2002) dalam Santoso (2005), fiskal akan berkesinambungan apabila rasio utang terhadap PDB bersifat stasioner. Salah satu alat untuk mengukur kesinambungan fiskal adalah nilai keseimbangan primer (*primary balance*) dalam APBN.

Menurut Thomas J. Sargent (2011) menyatakan utang pada dasarnya tidak perlu dipersoalkan, sepanjang dapat menghasilkan pendapatan (*revenues*) yang cukup

untuk membayar kembali utang tersebut. Dan salah satu alat untuk mengukur kesinambungan fiskal adalah melihat nilai keseimbangan primer (*primary balance*) dalam APBN (Sunarsip,2009). Keseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja tidak termasuk pembayaran bunga sedangkan keseimbangan umum ialah total penerimaan dikurangi belanja termasuk pembayaran bunga.

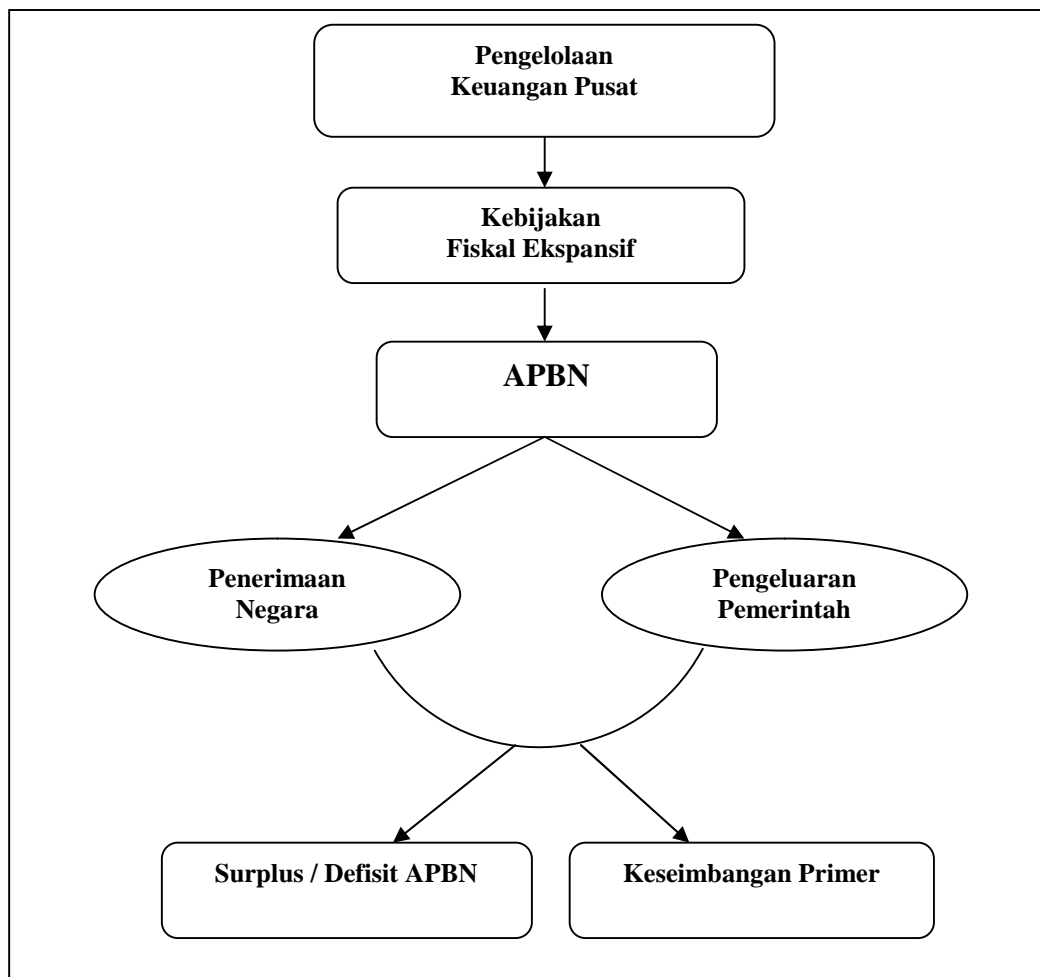
Sepatutnya keadaan keseimbangan primer ini berada pada posisi primer positif yang berarti posisi tersebut menunjukkan utang akan berkurang seiring dengan waktu. Tetapi sebaliknya posisi keseimbangan primer di Indonesia atau pun negara berkembang lainnya menunjukkan posisi primer negatif yang dalam jangka panjang akan membahayakan perekonomian sebab meningkatnya nilai utang secara signifikan (Djamester, 2007).

Indonesia pertama kali mengalami defisit pada saldo keseimbangan primer dari tahun 2012 dan makin merosot hingga sekarang. Neraca keseimbangan primer yang defisit ini menandakan bunga dan pokok utang dibayar dengan menggunakan utang. Pembayaran bunga dan cicilan utang tidak bisa lagi dibiayai oleh penerimaan negara, namun menggunakan pinjaman baru. Karena penerimaan negara yang semakin menurun melalui penerimaan perpajakan. Jika dikaitkan dengan teori Sargent, kemampuan utang Indonesia dalam menghasilkan pendapatan (*revenue*) untuk dipergunakan pemerintah membayar kembali bunga dan pokok utangnya kini semakin menurun.

Selain itu, juga terjadi defisit neraca pembayaran, yang menekan posisi cadangan devisa dan nilai kurs rupiah. Diantaranya karena lemahnya ekspor dan

membanjirnya impor serta rasio pembayaran utang luar negeri Indonesia terhadap penerimaan transaksi berjalan yang mengalami kenaikan tajam mencapai 39,1% di akhir tahun 2013. Sehingga, secara tidak langsung, posisi APBN dan utang pemerintah juga ikut memperlemah nilai tukar Rupiah dan neraca transaksi berjalan akan mengalami defisit. Tidak hanya itu kondisi ini pun disebabkan karena pengeluaran pemerintah yang begitu besar pada subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) yang memicu kenaikan impor BBM. Sedangkan harga minyak dunia terus mengalami peningkatan dengan nilai tukar Rupiah yang semakin melemah dan suku bunga internasional yang tinggi (Kementerian Keuangan RI, 2013).

Terjeratnya Indonesia dalam situasi krisis hutang seperti ini akan menimbulkan kekacauan ekonomi dalam stimulus fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Ketahanan fiskal pun akan semakin berkurang, kondisi ini akan menyebabkan tekanan terhadap utang pemerintah menjadi meningkat dan tingginya pembayaran utang pemerintah beserta beban bunganya membawa implikasi bagi perekonomian. Akibatnya, rasio utang luar negeri terhadap neraca berjalan beresiko akan meningkat. Keseimbangan primer berkaitan erat dengan defisit APBN. Jika dilihat secara keseluruhan Indonesia belum bisa mencapai kesinambungan fiskal secara optimal karena semakin tingginya belanja negara dan ketidak mampuan pihak pemerintah dalam membayar cicilan pokok utang, sehingga menyebabkan kesenjangan anggaran yang terus berlanjut. Dan diperlukan adanya analisis sebab terjadinya defisit keseimbangan primer dalam dua tahun terakhir ini dan pengaruhnya terhadap keberlanjutan fiskal Indonesia.



Gambar 3. Kerangka Pemikiran Analisis Determinan Keseimbangan Primer Sebagai Indikator Kestinambungan Fiskal

E. Hipotesis

Dari uraian diatas maka dapat diambil beberapa hipotesis yaitu :

1. Diduga penerimaan negara berpengaruh signifikan dan positif terhadap keseimbangan primer dalam jangka pendek dan jangka panjang.
2. Diduga pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap keseimbangan primer dalam jangka pendek dan jangka panjang.
3. Diduga utang pemerintah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap keseimbangan primer dalam jangka pendek dan jangka panjang.

4. Diduga inflasi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap keseimbangan primer dalam jangka pendek dan jangka panjang.
5. Diduga nilai tukar berpengaruh signifikan dan positif terhadap keseimbangan primer dalam jangka pendek dan jangka panjang.
6. Diduga harga minyak dunia berpengaruh signifikan dan negatif terhadap keseimbangan primer dalam jangka pendek dan jangka panjang.
7. Diduga secara bersama-sama variabel penerimaan negara, pengeluaran pemerintah, utang pemerintah, inflasi, nilai tukar, dan harga minyak dunia berpengaruh signifikan terhadap keseimbangan primer dalam jangka pendek dan jangka panjang.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian ini dibagi menjadi 5 bab yang akan diuraikan sesuai dengan kaidah penulisan dan disusun dengan sistematika tulisan sebagai berikut :

- BAB I** Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keangka pemikiran, hipotesis penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** Tinjauan pustaka yang menguraikan teori-teori yang melandasi dan mendukung penelitian ini yang diperoleh dari literatur dan sumber lainnya.
- BAB III** Metodologi penelitian yang menguraikan bagaimana penelitian ini dilakukan terdiri dari jenis penelitian, deskripsi dan pemilihan data, sumber dan teknik pemilihan data, definisi variabel yang diteliti,

model analisis data, pengujian model penelitian dari metode yang digunakan, uji stasioneritas, uji kointegrasi, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

BAB IV Pembahasan, analisis hasil dari pengujian statistik yang telah digunakan.

BAB V Kesimpulan dan saran